

PERAN PROSEDUR AUDIT DAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) DALAM PEMERIKSAAN PIUTANG USAHA DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Fitri Edfrianti¹⁾, Hero Priono²⁾Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

23013010352@student.upnjatim.ac.id, hero.priono.ak@upnjatim.ac.id

Abstract

Accounts receivable is an account susceptible to misstatement, necessitating adequate audit procedures to ensure its fair presentation in the financial statements. Furthermore, Audit Working Papers (AWP) serve as documentation for all audit procedures and evidence obtained during the audit process. This study aims to describe the execution of audit procedures for accounts receivable and explain the role of Audit Working Papers (AWP) in supporting audit quality. A qualitative method with a descriptive approach was employed. Data were gathered through observation during an internship, examination of Audit Working Papers (AWP), and a literature review. The audit of accounts receivable involved reconciling receivable balances, confirming balances with customers, examining supporting documents, and analyzing receivable aging to obtain sufficient audit evidence. All these procedures were documented in Audit Working Papers (AWP), thereby facilitating the review process, strengthening the basis for the audit opinion, and enhancing auditor accountability. Despite challenges such as delays in document submission by the client, time constraints, and the limited experience of junior auditors, the audit process was successfully conducted in accordance with the Professional Standards for Public Accountants (SPAP). Thus, the application of standard-compliant audit procedures and the systematic preparation of Audit Working Papers (AWP) contribute to supporting the quality of the accounts receivable audit.

Keywords: *audit procedures, accounts receivable, audit working papers, audit quality*

Abstrak

Piutang usaha merupakan salah satu akun yang memiliki risiko salah saji sehingga memerlukan prosedur audit yang memadai untuk memastikan kewajaran penyajiannya dalam laporan keuangan. Selain itu, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berfungsi sebagai dokumentasi atas seluruh prosedur audit dan bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan cara pelaksanaan prosedur audit terhadap piutang usaha serta menjelaskan peran Kertas Kerja Pemeriksaan dalam membantu mempertahankan kualitas audit. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi selama kegiatan magang, dokumentasi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan studi pustaka. Pelaksanaan pemeriksaan piutang usaha dilakukan melalui pencocokan saldo piutang, konfirmasi piutang kepada pelanggan, pemeriksaan dokumen pendukung, serta analisis umur piutang untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Seluruh prosedur tersebut didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sehingga memudahkan proses review, memperkuat dasar pemberian opini audit, dan meningkatkan akuntabilitas auditor. Meskipun terdapat kendala berupa keterlambatan penyampaian dokumen dari pihak klien, keterbatasan waktu audit, dan

Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pengalaman auditor junior yang masih terbatas, proses pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dengan demikian, penerapan prosedur audit yang sesuai standar dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sistematis berkontribusi dalam mendukung kualitas audit atas piutang usaha.

Kata Kunci: *prosedur audit, piutang usaha, kertas kerja pemeriksaan, kualitas audit*

Pendahuluan

Laporan keuangan adalah sumber informasi utama yang dipakai oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditur, manajemen, dan regulator untuk pengambilan keputusan ekonomi (Khaerryah, 2025). Karena itu, laporan keuangan perlu disajikan dengan wajar dan bebas dari kesalahan material. Untuk memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan tersebut, diperlukan proses audit yang dilakukan oleh auditor independen di Kantor Akuntan Publik (KAP) (Nasution, 2025a).

Salah satu akun yang diperhatikan auditor dalam proses audit adalah piutang usaha. Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan untuk penjualan barang atau jasa secara kredit (Ramadhanita et al., 2025). Akun ini memiliki risiko yang cukup tinggi karena berkaitan dengan kemungkinan piutang tidak tertagih, kesalahan pencatatan, pengakuan pendapatan yang tidak tepat, atau adanya manipulasi saldo piutang. Kesalahan dalam penyajian piutang usaha dapat langsung berdampak pada kewajaran laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan.

Urgensi pemeriksaan atas akun piutang usaha semakin meningkat seiring masih ditemukannya perusahaan tercatat yang belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan tepat waktu. Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2025 mengumumkan bahwa puluhan perusahaan tercatat masih belum menyampaikan laporan keuangan auditan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sehingga dikenai sanksi administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan masih menjadi perhatian, sehingga pelaksanaan prosedur audit yang memadai diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Dalam memeriksa piutang usaha, auditor harus melakukan berbagai prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Prosedur tersebut mencakup pengujian pengendalian, pemeriksaan dokumen pendukung, konfirmasi piutang kepada pelanggan, pengujian umur piutang, hingga evaluasi cadangan kerugian piutang (Rohim & Al Hadif, 2025). Semua prosedur yang dilakukan harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar yang berlaku (Diba & Budiwitjaksono, 2026).

Selain itu, berbagai kasus salah saji laporan keuangan menunjukkan bahwa akun piutang usaha merupakan salah satu akun yang memerlukan perhatian khusus dalam proses audit. Kesalahan pengakuan pendapatan, pencatatan piutang yang tidak didukung bukti memadai, maupun penilaian cadangan kerugian piutang yang kurang tepat dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar. Oleh karena itu, auditor perlu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui prosedur audit serta mendokumentasikan seluruh hasil pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) agar opini audit yang diberikan memiliki dasar yang kuat.

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) memiliki peran penting dalam proses audit karena berfungsi sebagai dokumentasi bukti audit yang diperoleh, prosedur yang dilakukan, serta kesimpulan yang diambil auditor. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) juga menjadi alat komunikasi di antara anggota tim audit dan dasar bagi reviewer maupun partner dalam menilai kualitas pekerjaan audit. Tanpa dokumentasi yang cukup, auditor akan sulit membuktikan bahwa

pemeriksaan telah dilakukan secara profesional dan sesuai standar (Putri & Budiwitjaksono, 2025).

Meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menjadikan kualitas dokumentasi audit semakin penting. Karena itu, pemahaman mengenai peran prosedur audit dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam pemeriksaan piutang usaha menjadi hal yang relevan untuk dibahas. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur audit dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berperan dalam mendukung efektivitas pemeriksaan piutang usaha di Kantor Akuntan Publik.

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada Teori Keagenan yang diusulkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Dalam hubungan ini sering terjadi asimetri informasi karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik perusahaan. Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan informasi, diperlukan pihak independen yaitu auditor yang bertugas memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan.

Dalam konteks audit piutang usaha, auditor berperan untuk memastikan bahwa saldo piutang yang disajikan oleh manajemen benar-benar ada, dapat ditagih, dan telah dicatat dengan benar. Dokumentasi audit melalui KKP menjadi bukti bahwa auditor telah melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional dalam mengurangi asimetri informasi tersebut.

Prosedur Audit Piutang Usaha

Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat. Menurut Arens et al (2023), prosedur audit untuk piutang usaha biasanya meliputi:

1. Memahami sistem pengendalian internal untuk siklus penjualan dan penerimaan kas
2. Melakukan analisis umur piutang (aging schedule)
3. Memeriksa dokumen pendukung seperti faktur penjualan dan surat jalan
4. Melakukan konfirmasi saldo piutang kepada pelanggan
5. Menelaah penerimaan kas setelah tanggal neraca
6. Mengevaluasi kecukupan cadangan kerugian piutang

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan adanya kelengkapan, penilaian, dan hak atas piutang usaha.

Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen yang dibuat auditor saat audit dilakukan. Kertas kerja pemeriksaan berisi bukti audit, hasil uji, analisis, dan kesimpulan yang dipakai untuk menyusun opini audit. Berdasarkan SPAP, dokumentasi audit harus cukup detail agar auditor lain yang tidak terlibat langsung bisa memahami pekerjaan yang sudah dilakukan (Anisa & Sari, 2024).

Dalam pemeriksaan piutang usaha, kertas kerja pemeriksaan bisa berupa laporan posisi keuangan, lead schedule, daftar umur piutang, hasil konfirmasi piutang, rekonsiliasi saldo, dan dokumen pengujian lain. Kelengkapan kertas kerja pemeriksaan menunjukkan auditor telah melakukan prosedur audit dengan baik dan mengikuti standar profesional.

Piutang Usaha Dalam Audit

Dalam pemeriksaan piutang usaha, auditor bertujuan untuk memastikan bahwa saldo piutang yang ditampilkan dalam laporan keuangan benar-benar ada (existence), dicatat sepenuhnya (completeness), dimiliki oleh perusahaan (rights and obligations), serta ditampilkan sebesar nilai yang dapat dicapai (valuation). Untuk mendapatkan keyakinan yang cukup, auditor melakukan berbagai prosedur audit seperti memeriksa dokumen pendukung, menganalisis umur piutang (aging schedule), mengonfirmasi piutang kepada pelanggan, serta menguji penerimaan kas setelah tanggal neraca.

Piutang usaha memiliki risiko salah saji yang cukup tinggi karena berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan kemungkinan adanya piutang yang tidak bisa ditagih. Kesalahan dalam pencatatan piutang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, auditor harus mendapatkan bukti audit yang memadai dan tepat untuk memastikan kewajaran saldo piutang usaha yang ditampilkan oleh perusahaan (Luthfia & Nilasari, 2025).

Dalam praktik audit, seluruh prosedur dan hasil pemeriksaan atas piutang usaha harus dicatat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Dokumentasi tersebut menjadi dasar bagi auditor dalam menarik kesimpulan dan memberikan opini atas laporan keuangan. Dengan demikian, pemeriksaan piutang usaha dilakukan dengan baik dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan serta kualitas audit secara keseluruhan.

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan kesalahan material dalam laporan keuangan berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat. Audit yang berkualitas menunjukkan bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar profesional yang berlaku sehingga hasil audit dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan (Nasution, 2025b).

Salah satu hal yang memengaruhi kualitas audit adalah bagaimana kualitas catatan yang dibuat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang menyeluruh dan mudah dipahami membantu auditor dalam mencatat langkah-langkah audit, bukti yang ditemukan, serta hasil akhir yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan. Selain itu, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) juga membantu auditor senior dalam meninjau proses agar dapat memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan baik.

Dalam pemeriksaan piutang usaha, dokumentasi yang baik membantu auditor melacak saldo piutang, hasil konfirmasi, serta bukti pendukung lainnya secara efisien. Oleh karena itu, penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang lengkap dan sesuai standar menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas audit dan mendukung keandalan opini auditor.

Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung dasar konseptual penelitian ini, penulis mengkaji beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan proses audit dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) pada audit laporan keuangan, terutama akun piutang usaha.

Hanif dan Suryaningrum (2024) dalam studi mereka tentang prosedur kertas kerja audit menyatakan bahwa penyusunan kertas kerja yang lengkap dan sesuai standar audit dapat membantu auditor mendapatkan bukti yang cukup serta mendukung pemberian opini audit yang benar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas dokumentasi audit memiliki hubungan yang dekat dengan efektivitas proses pemeriksaan.

Farhat dan Munari (2024) menjelaskan bahwa penerapan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) membantu auditor dalam menemukan area yang memiliki risiko salah saji tinggi dan memudahkan proses review oleh auditor senior. Namun, penelitian tersebut juga menemukan hambatan berupa terbatasnya waktu dan kompleksitas penyusunan dokumentasi audit.

Rakhmatullah dan Reskino (2024) menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemampuan auditor dalam melaksanakan prosedur audit dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dengan baik. Dokumentasi yang lengkap memungkinkan auditor mendapatkan bukti audit yang lebih dapat diandalkan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit dan kepercayaan pemakai laporan keuangan.

Berdasarkan studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prosedur audit yang baik dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang lengkap memiliki peran penting dalam

meningkatkan kualitas audit. Namun, penelitian yang secara khusus membahas peran prosedur audit dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam pemeriksaan piutang usaha di Kantor Akuntan Publik masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada pembahasan prosedur audit dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) pada akun piutang usaha sebagai salah satu akun yang memiliki risiko salah saji cukup tinggi dalam laporan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan prosedur audit dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) pada pemeriksaan piutang usaha di Kantor Akuntan Publik berdasarkan praktik yang dilakukan selama kegiatan magang.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan mengamati langsung proses audit selama masa magang, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen audit, seperti Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), serta bahan bacaan yang berkaitan dengan audit piutang usaha, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan tahapan prosedur audit atas piutang usaha, peran Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam mendukung proses audit, serta kendala yang dihadapi selama penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Selanjutnya, hasil pengamatan dianalisis dan dikaitkan dengan Teori Keagenan sebagai grand teori serta teori audit yang relevan untuk memperoleh pembahasan mengenai peran prosedur audit dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam mendukung kualitas audit.

Hasil

Prosedur Audit dalam Pemeriksaan Piutang Usaha

Pemeriksaan piutang usaha dimulai dengan mendapatkan informasi mengenai saldo piutang dari klien. Lalu auditor membandingkan jumlah piutang di buku besar dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Langkah ini bertujuan agar saldo yang akan dicek sesuai dengan catatan keuangan perusahaan.

Selanjutnya, auditor melakukan pengujian substantif terhadap saldo piutang. Salah satu prosedur yang sangat penting adalah konfirmasi piutang kepada pelanggan. Dengan prosedur ini, auditor mendapatkan bukti langsung dari pihak ketiga mengenai kebenaran saldo piutang yang tercatat. Kemudian hasil konfirmasi dibandingkan dengan catatan perusahaan untuk menemukan adanya perbedaan atau indikasi salah saji.

Selain konfirmasi, auditor juga memeriksa dokumen pendukung seperti faktur penjualan, surat jalan, kontrak penjualan, dan bukti penerimaan kas setelah tanggal neraca. Auditor menilai apakah transaksi penjualan yang mengakibatkan piutang benar-benar terjadi dan telah dicatat pada periode yang benar.

Auditor juga melakukan analisis umur piutang untuk menemukan piutang yang telah jatuh tempo dalam waktu lama. Analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menilai kecukupan cadangan kerugian piutang yang dibuat perusahaan. Jika ada piutang yang kemungkinan tidak tertagih namun belum dicadangkan secara cukup, auditor akan merekomendasikan penyesuaian kepada manajemen.

Pelaksanaan prosedur audit atas piutang usaha memiliki peran penting dalam mendukung kualitas audit karena setiap prosedur yang dilakukan membantu auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kewajaran saldo piutang usaha. Melalui pencocokan saldo, konfirmasi piutang, pemeriksaan dokumen pendukung, dan analisis umur piutang, auditor dapat mengidentifikasi kemungkinan salah saji serta menilai ketertagihan piutang secara lebih andal. Dengan demikian, prosedur audit yang dilaksanakan sesuai standar memberikan dasar

yang memadai bagi auditor dalam menyusun kesimpulan dan memberikan opini atas laporan keuangan.

Peran Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam Pemeriksaan Piutang Usaha

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berfungsi sebagai dokumentasi seluruh prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Dalam pemeriksaan piutang usaha, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berisi berbagai dokumen seperti lead schedule piutang, aging schedule, hasil konfirmasi piutang, working balance sheet, dan dokumentasi pengujian substantif yang lain.

Keberadaan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) membuat auditor lebih mudah dalam menelusuri proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Setiap temuan audit dapat didukung oleh bukti yang terdokumentasi secara jelas sehingga kesimpulan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Selain itu, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) juga dapat membantu reviewer dan partner audit dalam mengevaluasi apakah prosedur yang dilakukan telah memadai untuk mendukung opini audit.

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang lengkap dan tersusun secara sistematis dapat meningkatkan efisiensi proses audit karena auditor dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika dokumentasi tidak lengkap dapat menyebabkan kesulitan dalam proses review, meningkatkan risiko kesalahan, serta mengurangi kualitas hasil audit.

Selama pelaksanaan prosedur audit atas piutang usaha dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), auditor juga menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran proses audit. Kendala tersebut dijelaskan pada subbagian berikut.

Kendala dalam Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Dalam praktiknya, auditor sering menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Salah satu kendala yang umum adalah keterlambatan dokumen dari pihak klien. Ketika dokumen pendukung tidak tersedia dengan tepat waktu, auditor akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengujian dan menyelesaikan dokumentasi audit.

Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu audit dan banyak klien yang harus ditangani dalam periode yang sama. Kondisi ini dapat menyebabkan proses dokumentasi dilakukan secara terburu-buru sehingga bisa berisiko mengurangi kualitas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Selain itu, auditor junior terkadang masih menghadapi kesulitan dalam memahami teknik dokumentasi yang sesuai standar sehingga perlu supervisi dan bimbingan dari auditor senior.

Pembahasan

Pembahasan Prosedur Audit dalam Pemeriksaan Piutang Usaha

Teori Keagenan (Agency Theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan asimetri informasi karena manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, auditor independen berperan memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan melalui pelaksanaan prosedur audit yang sesuai dengan standar profesional. Dalam pemeriksaan piutang usaha, pelaksanaan prosedur audit menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa saldo piutang yang disajikan dalam laporan keuangan telah didukung oleh bukti audit yang memadai.

Pelaksanaan prosedur audit pada pemeriksaan piutang usaha dilakukan melalui pencocokan saldo piutang dengan buku besar dan laporan keuangan, konfirmasi piutang kepada pelanggan, pemeriksaan dokumen pendukung transaksi, serta analisis umur piutang. Prosedur tersebut sejalan dengan Arens et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemeriksaan piutang usaha bertujuan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung asersi keberadaan, hak, dan penilaian atas piutang usaha. Kesesuaian antara teori dan praktik tersebut menunjukkan bahwa prosedur audit telah diterapkan secara sistematis sehingga mampu memberikan dasar yang memadai bagi auditor dalam menilai kewajaran saldo piutang usaha. Melalui prosedur tersebut, auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai kewajaran saldo piutang usaha. Bukti audit tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kesimpulan audit sehingga opini yang diberikan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.

Pembahasan Peran Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) merupakan bagian penting dalam proses audit karena seluruh prosedur audit dan bukti audit yang diperoleh didokumentasikan secara sistematis. Dokumentasi tersebut meliputi lead schedule, aging schedule, hasil konfirmasi piutang, working balance sheet, serta dokumentasi pengujian substantif lainnya. Kondisi ini sesuai dengan teori mengenai Kertas Kerja Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berfungsi sebagai dokumentasi prosedur audit, bukti audit, serta dasar bagi auditor senior maupun partner dalam melakukan proses review.

Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang lengkap dan sistematis memberikan kemudahan dalam menelusuri setiap prosedur audit yang telah dilaksanakan sehingga seluruh kesimpulan audit dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) juga menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah prosedur audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dengan demikian, keberadaan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi audit, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas audit melalui penyediaan bukti audit yang lengkap, jelas, dan dapat ditelusuri kembali.

Pembahasan Kendala dalam Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KAP)

Pelaksanaan audit tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi selama proses dokumentasi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), seperti keterlambatan penyampaian dokumen dari pihak klien, keterbatasan waktu pelaksanaan audit, serta pengalaman auditor junior yang masih terbatas dalam menyusun dokumentasi audit, berpotensi menghambat proses pengumpulan bukti audit dan penyelesaian dokumentasi pemeriksaan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan audit apabila tidak segera ditangani.

Meskipun demikian, proses supervisi oleh auditor senior, pelaksanaan review secara berjenjang, serta koordinasi yang baik dengan pihak klien menjadi upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh penerapan prosedur audit, tetapi juga oleh kemampuan auditor dalam mengelola hambatan yang muncul selama proses pemeriksaan. Dengan dokumentasi audit yang tetap lengkap dan sesuai standar, auditor tetap dapat memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Kondisi itu sesuai dengan Teori Keagenan, yang menjelaskan bahwa adanya auditor yang independen membantu mengurangi perbedaan informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan.

Kesimpulan

Pelaksanaan prosedur audit atas piutang usaha dilakukan melalui serangkaian tahapan yang meliputi pencocokan saldo piutang dengan buku besar dan laporan keuangan, konfirmasi piutang kepada pelanggan, pemeriksaan dokumen pendukung, serta analisis umur piutang. Dengan menerapkan prosedur tersebut, auditor dapat mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat, sehingga dapat mengevaluasi apakah saldo piutang usaha tersebut wajar, sebagai dasar dalam memberikan opini atas laporan keuangan.

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berperan sebagai dokumentasi atas seluruh prosedur audit dan bukti audit yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang lengkap, sistematis, dan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) memudahkan proses review, memperkuat dasar pengambilan kesimpulan audit, serta meningkatkan akuntabilitas auditor. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti keterlambatan penyampaian dokumen dari klien, keterbatasan waktu audit, dan pengalaman auditor junior yang masih terbatas, kendala tersebut dapat diatasi melalui supervisi auditor senior, proses review secara berjenjang, serta koordinasi yang baik dengan pihak klien.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur audit atas piutang usaha dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) saling mendukung dalam

meningkatkan kualitas audit. Prosedur audit memungkinkan auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai kewajaran saldo piutang usaha, sedangkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) menjadi dokumentasi yang memperkuat proses review serta dasar dalam pemberian opini audit. Dengan demikian, penerapan prosedur audit yang sesuai standar dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sistematis berkontribusi terhadap terciptanya audit yang berkualitas dan laporan keuangan yang andal bagi para pengguna laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, N., & Sari, R. P. (2024). Mengapa Kertas Kerja Audit Tidak Boleh Diabaikan? *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)*, 3(1), 306-312. <https://ejournal.media-edutama.org/index.php/jebisma/article/download/131/127>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2023). *Auditing and Assurance Services* (18th Editi). Pearson.
- Diba, R. A. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2026). Penyusunan dan Analisis KKP atas Akun Kas Dalam Pemeriksaan Akuntansi: Studi Berbasis Praktik Di Kantor Akuntan. *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 6(1), 88-94. <https://doi.org/10.47065/jamek.v6i1.2324>
- Khaerryah, S. (2025). Peranan Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi: Sebuah Kajian Literatur. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 325-334. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v7i1.3093>
- Luthfia, A. A., & Nilasari, A. P. (2025). Perlakuan Audit Piutang Usaha dalam Mengidentifikasi Risiko Piutang Tak Tertagih Pada PT GOP oleh KAP Budiandru & Rekan Cabang Semarang. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, 3(2), 8-17. <https://journal.bukitpengharapan.ac.id/index.php/JUSAPAK/article/view/694>
- Nasution, N. A. (2025a). Analisis Kualitas Audit Dalam Menilai Laporan Keuangan Bisnis (Studi Kasus Pt. Darmi Bersaudara, Tbk Yang Terdaftar Di Bei) Pada Kantor Akuntan Publik (Kap) Gideon Medan. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/16702>
- Nasution, N. A. (2025b). Analisis Kualitas Audit Dalam Menilai Laporan Keuangan Bisnis (Studi Kasus PT. Darmi Bersaudara, Tbk Yang Terdaftar Di BEI) Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Medan. *Edunomika*, 9(1), 1-23. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/download/16702/7204/51894>
- Putri, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2025). Audit KKP Laporan Keuangan Puskesmas: Integrasi Akuntansi Terpadu Dan Pemeriksaan Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 5(3), 546-550. <https://doi.org/10.47065/jamek.v3i1.2132>
- Ramadhanita, T., Ilmi, A., Rahmawati, D., Alzahra, S., & Agha, R. (2025). Penerapan Prosedur Audit atas Piutang Usaha di KAP XX. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review*, 5(2), 13. <https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.3258>
- Rohim, M. F., & Al Hadif, M. A. (2025). Penerapan Prosedur Audit atas Akun Piutang Usaha: Studi pada Kantor Akuntan Publik Bayudi, Yohana, Suzy, Arie (KAP BYSA) Cabang Semarang. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.65310/8bk37e65>